Volume 9 Issue 3 (2026) Pages 374 - 385
YUME : Journal of Management
ISSN : 2614-851X (Online)

Tinjauan Konseptual Good Corporate Governance lewat Governance Scorecard dan Corporate Governance Disclosure pada Emiten Publik di Indonesia

Abdul Jabbar Ashari [1]✉
[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

Abstrak

Asimetri informasi pada perusahaan publik di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat efisiensi pasar dan kepercayaan investor, terutama karena penerapan Good Corporate Governance (GCG) kerap bersifat formalitas. Penelitian ini berlandaskan Agency Theory dan Stewardship Theory untuk menjelaskan dinamika hubungan antara manajemen dan pemegang saham dalam kerangka tata kelola perusahaan. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, kajian ini bertumpu pada telaah literatur kritis terhadap 15 rujukan utama guna menyusun sintesis konseptual yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan adanya paradoks antara governance scorecard sebagai penanda kepatuhan formal dan corporate governance disclosure sebagai cerminan transparansi substantif: skor tata kelola yang tinggi belum tentu sejalan dengan kinerja perusahaan maupun berkurangnya konflik agensi. Dalam konteks ini, pengungkapan yang lebih mendalam dan sukarela berperan strategis dalam meredam asimetri informasi serta meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini mengusulkan model GCG yang direkonseptualisasi dengan memadukan kepatuhan struktural dan transparansi substantif sebagai pendekatan holistik untuk menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari tata kelola berbasis kepatuhan menuju tata kelola berbasis transparansi di pasar berkembang seperti Indonesia.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance; governance scorecard; corporate governance disclosure; asimetri informasi; perusahaan publik.*

Abstract

Unequal access to information between managers and investors in Indonesian listed firms continues to undermine market efficiency and investor confidence, especially because the adoption of Good Corporate Governance (GCG) frequently remains ceremonial. Drawing on Agency Theory and Stewardship Theory, this paper explains how management and shareholders interact within a corporate governance framework. A qualitative-descriptive design is applied, relying on a critical review of 15 principal references to build an integrated conceptual synthesis. The analysis uncovers a paradox: governance scorecards capture formal compliance, whereas corporate governance disclosure reflects genuine transparency, and a high governance score does not automatically translate into better firm performance or fewer agency conflicts. Within this setting, extensive and voluntary disclosure serves a strategic function in easing information asymmetry and strengthening investor trust. The paper puts forward a reconceptualized GCG model that combines structural compliance with substantive transparency as an all-encompassing route to sustainable firm value. The results point to the

need to move from compliance-oriented governance to transparency-oriented governance in emerging markets such as Indonesia.

Keywords: *Good Corporate Governance; governance scorecard; corporate governance disclosure; information asymmetry; public companies.*

Copyright (c) 2026 Abdul Jabbar Ashari

✉ Corresponding author :
Email Address : jabbarashari@gmail.com

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan muncul untuk menjawab persoalan mendasar dalam relasi keagenan, yakni ketimpangan informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Di pasar modal, situasi tersebut membuka peluang benturan kepentingan yang berisiko merugikan investor apabila tidak disertai pengawasan yang efektif. Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa asimetri informasi membuat sistem pengungkapan yang transparan menjadi penting guna menekan ketidakpastian dan memperbaiki efisiensi pasar. Selaras dengan hal itu, Shleifer dan Vishny (1997) mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan mekanisme yang disusun agar pemberi dana mendapatkan imbal hasil yang layak dari investasinya. Karena itu, GCG bukan sekadar alat kendali internal, melainkan landasan pokok untuk membangun kepercayaan pasar dan menjaga kesinambungan perusahaan. Pentingnya hal ini kian besar seiring struktur organisasi yang makin rumit dan desakan global akan praktik bisnis yang akuntabel. Di negara berkembang, penerapan GCG menemui hambatan yang lebih berat daripada di negara maju, khususnya karena sistem hukum yang lemah, perlindungan investor yang minim, dan mutu institusi yang rendah. Klapper dan Love (2004) memperlihatkan bahwa mutu tata kelola di pasar negara berkembang sangat beragam dan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan maupun derajat perlindungan investor. Gejala itu tampak di Indonesia melalui studi Darmawati (2005), yang mendapati bahwa penerapan GCG belum konsisten dalam mendongkrak kinerja perusahaan. Arifin (2005) juga mengungkapkan hal senada, yakni praktik tata kelola di Indonesia masih cenderung sebatas formalitas dan belum meresap ke dalam pengambilan keputusan strategis. Keadaan ini menandakan adanya jarak antara regulasi yang ditetapkan dan pelaksanaannya di tataran operasional perusahaan. Maka dari itu, penelaahan terhadap mekanisme dan efektivitas GCG di Indonesia semakin penting agar dinamika tersebut dapat dipahami secara lebih utuh.

Salah satu cara yang kian lazim untuk menilai mutu tata kelola perusahaan adalah governance scorecard, atau indeks tata kelola. Gompers (2003) menyusun indeks yang dapat mengubah praktik GCG menjadi ukuran kuantitatif dan mengaitkannya dengan kinerja pasar saham, sehingga evaluasi tata kelola memiliki pijakan empiris. Black (2006) mengemukakan pendekatan serupa dan memperlihatkan bahwa skor tata kelola secara signifikan mampu memprediksi nilai pasar perusahaan. Walau begitu, Bhagat dan Bolton (2008) mengkritik bahwa keterkaitan antara skor tata kelola dan kinerja perusahaan tidak selalu stabil, sebab ada beragam faktor kontekstual dan metodologis yang memengaruhinya. Kritik tersebut menyoroti kelemahan pendekatan kuantitatif yang cenderung meringkas

kerumitan praktik tata kelola menjadi angka semata. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan konseptual yang dapat menerangkan makna di balik skor itu serta menghubungkannya dengan praktik nyata di perusahaan.

Di luar pengukuran berbasis indeks, aspek penting lain dari GCG adalah pengungkapan informasi (corporate governance disclosure) yang menggambarkan seberapa transparan dan akuntabel suatu perusahaan. Haat (2008) menemukan bahwa transparansi yang tinggi berdampak positif pada kinerja perusahaan, terutama lewat meningkatnya kepercayaan investor. Pada konteks Indonesia, Herawaty (2008) menegaskan bahwa GCG dapat bertindak sebagai variabel moderasi yang menguatkan hubungan antara manajemen laba dan mutu laporan keuangan. Adapun Pratiwi dan Nurhayati (2015) mendapati bahwa kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan informasi masih berbeda-beda, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip transparansi. Perbedaan itu memberi petunjuk bahwa pengungkapan dipengaruhi bukan hanya oleh regulasi, melainkan juga oleh tekad internal perusahaan terhadap tata kelola yang baik. Maka, menelaah disclosure menjadi hal yang menentukan untuk mengetahui seberapa jauh prinsip GCG dijalankan secara substantif.

Dari penjabaran di atas tampak adanya celah teoretis antara pengukuran formal lewat governance scorecard dan kenyataan pelaksanaan yang terpantul dalam corporate governance disclosure, terutama pada perusahaan publik di Indonesia. Scorecard condong menitikberatkan kuantifikasi dan kepatuhan struktural, sedangkan disclosure menggambarkan sisi transparansi yang lebih substantif dan bergantung pada konteks. Celah ini memberi peluang untuk menyusun kajian konseptual yang memadukan kedua sudut pandang secara menyeluruh. Unsur pembaruan dalam studi ini adalah upaya membangun ulang pemahaman tentang GCG dengan menyatukan analisis scorecard dan disclosure sebagai dua pendekatan yang saling menyempurnakan. Dengan begitu, tulisan ini bertujuan menganalisis secara konseptual cara kedua instrumen tersebut dipakai untuk menilai mutu tata kelola perusahaan publik di Indonesia dengan lebih holistik. Hasilnya diharapkan menyumbang secara teoretis bagi perkembangan literatur GCG, sekaligus menjadi rujukan bagi praktisi dan regulator untuk mempertinggi efektivitas penerapan tata kelola perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Teori

Agency Theory adalah pijakan utama untuk memahami praktik Good Corporate Governance (GCG), terutama dalam menjelaskan hubungan kontraktual antara penyedia modal (principal) dan manajemen (agent). Kerangka ini berasumsi bahwa benturan kepentingan bisa muncul karena tujuan kedua pihak tidak selalu searah. Manajemen selaku agen cenderung berupaya memaksimalkan kepuasan pribadinya, sehingga keputusan yang diambil dapat kurang menguntungkan pemegang saham. Situasi ini menimbulkan biaya agensi (agency cost) yang perlu ditekan lewat mekanisme pengendalian yang efektif. Karena itu, struktur tata kelola perusahaan disusun sebagai alat pengawasan agar langkah manajemen tetap sejalan dengan kepentingan pemilik.

Selain itu, Agency Theory menggarisbawahi peran keterbukaan informasi sebagai sarana untuk memperkecil asimetri informasi antara manajemen dan investor. Dalam hal ini, corporate governance disclosure menjadi mekanisme yang menentukan karena memberi pemegang saham informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai aktivitas perusahaan. Meski begitu, keampuhan mekanisme ini sangat tergantung pada mutu dan kedalaman pengungkapannya. Disclosure yang hanya bersifat simbolik atau sekadar menggugurkan kewajiban regulasi belum cukup untuk meredakan konflik agensi secara berarti. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan tata kelola yang menekankan bukan hanya kepatuhan formal, tetapi juga kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengarahkan perusahaan agar tercipta nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Asas-asas pokok GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, menjadi pijakan dalam membangun praktik tata kelola yang efektif. Penerapan GCG yang baik diyakini dapat menaikkan efisiensi operasional perusahaan sekaligus menguatkan kepercayaan investor. Secara global, telah dikembangkan berbagai model pengukuran GCG, termasuk governance scorecard yang dipakai untuk menilai sejauh mana perusahaan mematuhi standar tertentu.

Namun, penerapan GCG di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi kendala yang tidak ringan. Kepatuhan pada prinsip GCG kerap hanya berupa pemenuhan administrasi sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan mutu pelaksanaan yang sebenarnya. Akibatnya muncul jurang antara nilai yang ditampilkan governance scorecard dan kenyataan praktik tata kelola di lapangan. Maka evaluasi GCG perlu memperhitungkan dimensi yang lebih luas, termasuk transparansi dan keterbukaan informasi yang bersifat substantif. Dengan begitu, GCG tidak hanya dipandang sebagai kerangka normatif, melainkan juga praktik yang dinamis dan dipengaruhi oleh konteks institusional serta budaya organisasi.

Berlawanan dengan anggapan dasar Agency Theory yang melihat manajemen sebagai pihak yang cenderung oportunis, Stewardship Theory menyodorkan sudut pandang alternatif yang lebih optimistis tentang perilaku manajerial. Teori ini berpendapat bahwa manajemen pada hakikatnya bertindak sebagai steward atau pengelola yang berintegritas, berkomitmen, dan berorientasi kolektif demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam kerangka tersebut, kepentingan manajemen dan pemilik tidak dianggap bertentangan sejak awal, tetapi sebagai hubungan yang bisa diselaraskan lewat nilai profesionalisme dan rasa tanggung jawab. Maka mekanisme pengendalian tidak hanya berfungsi membatasi, melainkan juga memberdayakan agar kinerja menjadi optimal. Sudut pandang ini penting untuk menyadari bahwa tata kelola perusahaan tidak harus selalu bertumpu pada anggapan bahwa manajemen tidak bisa dipercaya.

Terkait corporate governance disclosure, Stewardship Theory memberi pembenaran konseptual bagi pentingnya pengungkapan informasi yang substantif dan sukarela. Manajemen yang berperan sebagai steward cenderung punya dorongan dari dalam diri untuk menyampaikan informasi secara terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban moral kepada pemangku kepentingan. Hal ini menguatkan argumen bahwa mutu disclosure ditentukan bukan semata oleh tekanan regulasi,

tetapi juga oleh komitmen internal perusahaan pada integritas. Jadi pendekatan stewardship dapat menyeimbangkan pandangan negatif Agency Theory dengan menonjolkan sisi etika dan kepercayaan dalam tata kelola. Memadukan kedua teori ini menghasilkan landasan konseptual yang lebih berimbang untuk menganalisis praktik GCG di perusahaan publik Indonesia.

Governance Scorecard sebagai Alat Ukur GCG

Governance scorecard adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengukur derajat penerapan GCG secara kuantitatif lewat sejumlah indikator. Model ini biasanya menelaah komposisi dewan, hak pemegang saham, transparansi, dan mekanisme pengawasan internal. Dalam praktik, governance scorecard memudahkan perbandingan antarperusahaan maupun antarnegara. Meski demikian, pendekatan ini terbatas karena cenderung terpaku pada kepatuhan formal dan tidak menilai kualitas pelaksanaan secara mendalam. Kritik terhadap governance scorecard timbul dari tidak selarasnya skor tinggi dengan kinerja perusahaan yang belum tentu optimal. Ini memperlihatkan bahwa indikator kuantitatif tidak selalu sanggup menangkap dinamika internal perusahaan yang rumit. Di Indonesia gejala ini kian relevan karena perusahaan cenderung memenuhi persyaratan regulasi sekadar secara administratif. Karena itu, governance scorecard perlu dilengkapi pendekatan lain yang mampu mencerminkan praktik tata kelola secara lebih substantif.

Corporate Governance Disclosure dan Keterbukaan Informasi

Corporate governance disclosure mengacu pada praktik menyampaikan informasi tentang tata kelola perusahaan kepada publik sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Isinya meliputi keterangan tentang struktur organisasi, mekanisme pengawasan, kebijakan internal, dan praktik etika perusahaan. Menurut teori keagenan, disclosure berfungsi sebagai sarana untuk menurunkan asimetri informasi antara manajemen dan investor. Makin baik mutu pengungkapan, makin kecil kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.

Selanjutnya, disclosure yang dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) berperan strategis dalam membangun kepercayaan investor. Pengungkapan yang melebihi kewajiban regulasi memperlihatkan tekad perusahaan terhadap transparansi dan integritas. Di pasar berkembang, yang kualitas institusinya masih beragam, disclosure menjadi tolok ukur penting untuk menilai kredibilitas perusahaan. Maka corporate governance disclosure tidak hanya berguna sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi yang menguatkan kedudukan perusahaan di mata pasar.

Sintesis Teori: Memadukan Scorecard dan Disclosure

Dari uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa governance scorecard dan corporate governance disclosure mewakili dua dimensi yang berlainan dalam pengukuran GCG. Scorecard berpusat pada kepatuhan struktural, sementara disclosure menonjolkan transparansi yang substantif. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, sehingga keduanya tidak bisa dipakai sendiri-sendiri untuk menilai mutu tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

Memadukan kedua pendekatan ini penting untuk menyusun kerangka evaluasi GCG yang lebih holistik. Governance scorecard dapat dimanfaatkan sebagai

alat diagnosis awal untuk menakar kesiapan institusional perusahaan, sedangkan disclosure memberi gambaran lebih dalam tentang praktik nyata yang dijalankan. Dengan menggabungkan kedua dimensi itu, analisis tata kelola perusahaan menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kondisi pasar. Sintesis ini juga membuka peluang untuk mengembangkan model konseptual yang lebih adaptif dalam menerangkan dinamika GCG di Indonesia sebagai pasar berkembang.

METODOLOGI

Studi ini memakai pendekatan kualitatif-deskriptif dengan rancangan conceptual paper yang diarahkan pada penyusunan sintesis teoretis tentang Good Corporate Governance (GCG) lewat dua instrumen pokok, yaitu governance scorecard dan corporate governance disclosure. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggalian mendalam atas konsep, teori, dan temuan empiris yang sudah ada guna membangun kerangka konseptual yang lebih menyeluruh. Seluruh data berasal dari data sekunder berupa 15 artikel ilmiah bereputasi yang berkaitan dengan GCG, agency theory, dan transparansi informasi di pasar berkembang. Semua rujukan dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian tema, sumbangan teoretis, dan relevansi konteks terhadap perusahaan publik di Indonesia. Dengan begitu, data yang dipakai tidak diambil sembarangan, tetapi sudah melewati seleksi yang sistematis dan terarah. Analisis diawali dengan literature extraction, yaitu mengenali secara eksplisit variabel kunci pada setiap rujukan, meliputi: (1) fokus kajian utama, (2) pendekatan pengukuran GCG, (3) indikator transparansi atau disclosure, dan (4) implikasi bagi kinerja perusahaan atau konflik agensi. Tiap artikel lalu dikodekan dengan teknik open coding untuk menghimpun tema konseptual yang berulang. Hasil pengodean disusun menjadi kategori tematik yang lebih tinggi lewat axial coding, sehingga terbentuk tiga klaster utama: (i) studi dasar GCG dan teori keagenan, (ii) pengukuran tata kelola melalui indeks atau governance scorecard, dan (iii) praktik disclosure serta transparansi pada perusahaan publik. Proses ini menjamin bahwa sintesis yang dihasilkan bertumpu pada dasar analitis yang kokoh dan tertata.

Berikutnya, penelitian ini menerapkan teknik content analysis secara sistematis yang terdiri dari dua tahap utama, yakni data reduction dan data display. Pada tahap reduksi, informasi yang tidak relevan disingkirkan, sedangkan konsep kunci diringkas tanpa mengurangi inti teoretisnya. Reduksi ini dipusatkan pada hubungan antara mekanisme governance, transparansi informasi, dan kinerja perusahaan. Tahap selanjutnya adalah data display, yaitu hasil pengodean dan pengategorian disajikan dalam bentuk matriks klasifikasi literatur agar pola dan keterkaitan antarstudi lebih mudah dibaca. Visualisasi ini tidak hanya meningkatkan keterbacaan (scannability), tetapi juga memperkuat transparansi metodologis dalam penelitian konseptual.

Tabel 1. Matriks Pengelompokan Literatur Good Corporate Governance

No	Penulis (Tahun)	Topik Kajian	Kelompok
1	Aguilera & Cuervo-Cazurra (2009)	Peraturan dan kode GCG di tingkat global	Kajian Pokok GCG
2	Allegrini & Greco (2013)	Fungsi dewan dan disclosure	Pengungkapan/Keterbukaan

No	Penulis (Tahun)	Topik Kajian	Kelompok
3	Arifin (2005)	GCG serta kinerja perusahaan di Indonesia	Kajian Pokok GCG
4	Bhagat & Bolton (2008)	GCG serta kinerja finansial	Skor/Indeks Tata Kelola
5	Black (2006)	Governance index serta nilai pasar	Skor/Indeks Tata Kelola
6	Darmawati (2005)	GCG di perusahaan tercatat BEI	Kajian Pokok GCG
7	Gompers (2003)	Governance index serta harga saham	Skor/Indeks Tata Kelola
8	Haat (2008)	Keterbukaan dan kinerja	Pengungkapan/Keterbukaan
9	Healy & Palepu (2001)	Ketimpangan informasi dan disclosure	Pengungkapan/Keterbukaan
10	Herawaty (2008)	GCG selaku variabel moderating	Kajian Pokok GCG
11	Klapper & Love (2004)	GCG di pasar berkembang	Pengungkapan/Keterbukaan
12	Pratiwi & Nurhayati (2015)	Keterbukaan perusahaan	Pengungkapan/Keterbukaan
13	Sari & Riduwan (2013)	GCG serta nilai perusahaan	Kajian Pokok GCG
14	Shleifer & Vishny (1997)	Landasan teori corporate governance	Kajian Pokok GCG
15	Widyati (2013)	Fungsi komisaris dan komite audit	Pengungkapan/Keterbukaan

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa sebaran literatur tidak hanya berpusat pada aspek struktural GCG, tetapi juga mencakup dimensi pengukuran dan transparansi secara berimbang. Hal ini menjadi dasar penting untuk membangun analisis konseptual yang memadukan governance scorecard dan corporate governance disclosure. Melalui pendekatan metodologis yang sistematis ini, penelitian dapat menghasilkan sintesis yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Governance Scorecard versus Kenyataan Kepatuhan Emiten di Indonesia

Pendekatan governance scorecard yang dirintis Gompers (2003) dan dikembangkan lebih jauh oleh Black (2006) pada dasarnya bertujuan mengubah mutu tata kelola menjadi ukuran kuantitatif lewat indikator terstruktur yang dapat dibandingkan antarperusahaan. Secara teori, makin tinggi skor suatu perusahaan, makin baik pula tata kelolanya dan makin tinggi nilai pasar yang tercipta. Akan tetapi, dalam praktik hubungan itu tidak selalu linier dan konsisten, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Bhagat dan Bolton (2008) mengkritik bahwa ukuran berbasis indeks kerap gagal menangkap dinamika internal perusahaan, termasuk efektivitas pengawasan dan integritas manajerial. Kritik ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan emiten di Bursa Efek Indonesia, yang kepatuhannya terhadap indikator tata kelola sering sebatas administratif. Dengan demikian, scorecard

cenderung menggambarkan kepatuhan formal, bukan mutu pelaksanaan yang substantif.

Bukti empiris di Indonesia menguatkan adanya paradoks antara skor tata kelola dan kinerja perusahaan. Darmawati (2005) memperlihatkan bahwa penerapan GCG tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang menandakan implementasinya kurang efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Arifin (2005) bahwa praktik tata kelola di Indonesia masih didominasi kepatuhan formal pada regulasi tanpa diikuti penghayatan nilai-nilai governance. Keadaan ini melahirkan gejala box-ticking compliance, yaitu perusahaan memenuhi indikator penilaian tanpa benar-benar mengubah perilaku organisasi secara mendasar. Dalam situasi seperti itu, governance scorecard kehilangan daya prediksinya karena tidak mampu menangkap mutu pengambilan keputusan manajerial. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih reflektif untuk menilai efektivitas GCG di Indonesia, terutama dengan memperhitungkan aspek non-kuantitatif.

Keefektifan Corporate Governance Disclosure sebagai Alat Meredam Asimetri Informasi

Pengungkapan informasi tata kelola (corporate governance disclosure) berperan strategis dalam menurunkan asimetri informasi antara manajemen dan investor. Healy dan Palepu (2001) menegaskan bahwa transparansi yang tinggi membuat investor dapat mengambil keputusan yang lebih rasional karena memperoleh informasi yang relevan dan kredibel. Aguilera dan Cuervo-Cazurra (2009) menambahkan bahwa pengungkapan yang komprehensif turut bekerja sebagai mekanisme disiplin eksternal yang mendorong perusahaan memperbaiki mutu tata kelolanya. Di sini disclosure bukan hanya informatif, tetapi juga normatif karena mencerminkan tekad perusahaan terhadap prinsip akuntabilitas. Oleh sebab itu, derajat keterbukaan informasi dapat dijadikan tolok ukur penting untuk menilai kualitas GCG secara substantif. Hal ini menjadikan disclosure instrumen yang lebih dinamis daripada governance scorecard yang bersifat statis.

Keefektifan disclosure sangat dipengaruhi mutu struktur pengawasan internal, khususnya peran dewan komisaris dan komite audit. Widyati (2013) menunjukkan bahwa adanya komisaris independen dan komite audit turut meningkatkan mutu pelaporan dan transparansi perusahaan. Temuan itu didukung Allegrini dan Greco (2013), yang menegaskan bahwa pengawasan dewan yang efektif mendorong naiknya pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Dalam praktik, perusahaan yang aktif membuka informasi melampaui kewajiban regulasi cenderung menikmati kepercayaan investor yang lebih tinggi. Klapper dan Love (2004) serta Haat (2008) memperlihatkan bahwa transparansi tinggi berkorelasi positif dengan kinerja perusahaan dan nilai pasar. Dengan demikian, disclosure bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga mekanisme strategis untuk membangun reputasi dan legitimasi di pasar modal.

Perumusan Ulang Model GCG pada Perusahaan Publik di Indonesia

Terbatasnya governance scorecard dan unggulnya disclosure dalam menggambarkan kenyataan tata kelola menunjukkan perlunya pendekatan integratif dalam menilai GCG. Model konseptual yang ditawarkan studi ini menempatkan scorecard sebagai penanda kepatuhan struktural dan disclosure sebagai penanda

mutu pelaksanaan. Herawaty (2008) menekankan bahwa GCG dapat berperan sebagai variabel moderasi yang menguatkan hubungan antara praktik manajerial dan mutu informasi keuangan. Dalam kerangka ini, memadukan kedua instrumen memungkinkan penilaian tata kelola perusahaan yang lebih menyeluruh. Scorecard memberi potret awal tentang struktur tata kelola, sedangkan disclosure menyingkap bagaimana struktur itu dijalankan dalam praktik. Dengan demikian, gabungan keduanya menghasilkan sudut pandang yang lebih holistik dan tidak terjebak pada formalitas semata.

Memadukan governance scorecard dan disclosure membawa implikasi penting bagi penciptaan nilai perusahaan, terutama di pasar berkembang yang bergejolak seperti Indonesia. Sari dan Riduwan (2013) menunjukkan bahwa tata kelola yang baik menambah nilai perusahaan melalui meningkatnya kepercayaan investor. Sementara itu, Pratiwi dan Nurhayati (2015) menegaskan bahwa transparansi yang tinggi menandakan kepatuhan yang lebih substansial terhadap prinsip GCG. Dari sudut pandang ini, perusahaan yang sanggup menggabungkan kepatuhan formal dengan transparansi substantif memiliki keunggulan bersaing yang lebih tahan lama. Model ini juga relevan menghadapi desakan global akan praktik bisnis yang lebih akuntabel dan berwawasan jangka panjang. Oleh karena itu, rekonseptualisasi GCG tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga membawa implikasi praktis bagi regulator dan pelaku pasar dalam meningkatkan mutu tata kelola perusahaan publik di Indonesia.

SIMPULAN

Kajian konseptual ini menegaskan bahwa pengukuran Good Corporate Governance (GCG) lewat governance scorecard dan corporate governance disclosure mewakili dua dimensi yang berbeda tetapi saling menyempurnakan dalam memahami mutu tata kelola perusahaan. Governance scorecard berperan sebagai penanda kepatuhan struktural yang menggambarkan sejauh mana perusahaan memenuhi standar formal yang ditetapkan regulator. Namun, dimensi ini belum sepenuhnya mampu menangkap mutu pelaksanaan yang substantif, terlebih di pasar berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi kendala institusional. Sebaliknya, corporate governance disclosure memberi gambaran yang lebih reflektif tentang praktik transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan perusahaan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Dalam kerangka teori keagenan, memadukan kedua pendekatan ini merupakan mekanisme yang lebih efektif untuk menekan asimetri informasi antara manajemen dan investor. Karena itu, pemahaman GCG yang utuh tidak dapat hanya bersandar pada indikator kuantitatif, melainkan harus memperhitungkan dimensi kualitatif yang tampak dalam praktik pengungkapan informasi.

Interaksi antara governance scorecard dan disclosure memperlihatkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan ditentukan bukan hanya oleh adanya struktur formal, tetapi juga oleh mutu pelaksanaan dan komitmen pada transparansi. Scorecard menyediakan dasar penilaian awal mengenai kesiapan institusional perusahaan, sedangkan disclosure menyingkap kenyataan operasional yang sebenarnya. Di Indonesia, tempat kepatuhan sering sebatas administratif, disclosure menjadi instrumen yang lebih peka dalam mendeteksi integritas tata kelola. Maka

memadukan kedua instrumen ini menghasilkan pendekatan evaluasi yang lebih holistik dan lentur terhadap dinamika pasar. Kesimpulan ini mengarah pada pemahaman bahwa GCG yang efektif harus dipandang sebagai perpaduan antara kepatuhan formal dan transparansi substantif. Dengan pendekatan itu, perusahaan publik dapat membangun kepercayaan investor secara berkesinambungan sekaligus menaikkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Keterbatasan Penelitian

Temuan konseptual studi ini memperluas sudut pandang agency theory dengan menegaskan bahwa mekanisme pengendalian tidak cukup bersifat struktural, tetapi harus pula mencakup dimensi transparansi informasi. Perpaduan governance scorecard dan disclosure memperlihatkan bahwa berkurangnya biaya agensi tidak hanya bergantung pada rancangan institusional, tetapi juga pada mutu penyampaian informasi kepada pasar. Hal ini menyumbang bagi pengembangan teori keagenan di pasar berkembang yang karakter institusionalnya berbeda dari negara maju. Dengan demikian, pendekatan teoretis yang lebih kontekstual diperlukan untuk memahami dinamika hubungan principal dan agent di Indonesia.

Keterbatasan utama studi ini terletak pada pendekatannya, yaitu kajian konseptual murni tanpa dukungan uji empiris maupun analisis ekonometrika. Karena bersandar pada literatur sekunder, hasil penelitian lebih bersifat interpretatif dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Selain itu, ketiadaan data kuantitatif dari perusahaan publik di Indonesia membatasi kemampuan untuk mengukur langsung hubungan antara governance scorecard, disclosure, dan kinerja perusahaan. Keterbatasan ini merupakan konsekuensi dari rancangan penelitian yang memang diarahkan pada penyusunan kerangka teoretis.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menguji model konseptual yang diajukan dalam studi ini melalui pendekatan empiris yang lebih menyeluruh. Metode mixed-methods dapat memberi pemahaman yang lebih dalam karena memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif. Di samping itu, analisis data panel berskala besar pada perusahaan publik di Indonesia dapat dipakai untuk menguji hubungan antara governance scorecard, disclosure, dan nilai perusahaan secara lebih robust. Peneliti juga dapat mempertimbangkan variabel moderasi seperti kualitas institusi dan struktur kepemilikan untuk memperkaya model analisis. Dengan begitu, pengembangan riset ke depan diharapkan dapat memberi validasi empiris bagi kerangka konseptual yang telah dirumuskan dalam studi ini.

Referensi :

Allegrini, M., & Greco, G. (2013). Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure. Journal of Management & Governance, 17(1), 187–216. https://doi.org/10.1007/s10997-011-9168-3

Arifin, Z. (2005). Hubungan antara corporate governance dan kinerja perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.21002/jaki.2005.01

Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of Corporate Finance, 14(3), 257–273. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.03.006

Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does corporate governance predict firms' market

values? Journal of Law, Economics, and Organization, 22(2), 366–413. https://doi.org/10.1093/jleo/ewj018

Darmawati, D., Khomsiyah, & Rahayu, R. (2005). Hubungan corporate governance dan kinerja perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 8(1), 65–81. https://doi.org/10.33312/jrai.v8i1.106

Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. Quarterly Journal of Economics, 118(1), 107–156. https://doi.org/10.1162/00335530360535162

Haat, M. H. C., Rahman, R. A., & Mahenthiran, S. (2008). Corporate governance, transparency and performance. Managerial Auditing Journal, 23(8), 744–778. https://doi.org/10.1108/02686900810899518

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and capital markets. Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), 405–440. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0

Herawaty, V. (2008). Peran corporate governance sebagai variabel moderating. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 97–108. https://doi.org/10.9744/jak.10.2.PP.97-108

Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. Journal of Corporate Finance, 10(5), 703–728. https://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00046-4

Pratiwi, M. W., & Nurhayati, I. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap transparansi perusahaan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(2), 323–340. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6026

Sari, R. N., & Riduwan, A. (2013). Pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1(1), 1–20. https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/8

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The Journal of Finance, 52(2), 737–783. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x

Widyati, M. F. (2013). Pengaruh dewan direksi, komisaris independen, komite audit terhadap kinerja perusahaan. Jurnal Ilmu Manajemen, 1(1), 234–249. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/1500